

***The Effect Of Inflation, Gross Domestic Products And Regional Minimum Wage On
Human Development Index
Province Of East Nusa Tenggara***

**Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, Gaudensia Seuk

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

emilia.kiha02@gmail.com

Received : Februari 2021, Revised : Maret 2021, Accepted : Maret 2021

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari beberapa indikator Makro seperti Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data *time series* (sumber Badan Pusat Statistik) Provinsi Nusa Tenggara Timur, data yang di kumpul dari tahun 2000-2019 menggunakan regresi berganda, kemudian di olah menggunakan SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial dan simultan ada pengaruh tidak signifikan antara variabel Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan, Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh variabel Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional hanya sebesar 27 %, sedangkan sisanya sebesar 73 % di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Variabel Upah Minimum Regional memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel IPM di provinsi Nusa Tenggara Timur dari pada variabel Inflasi dan PDRB dikarenakan apabila upah tenaga kerja mengalami peningkatan maka kesejahteraan tenaga kerja tersebut akan meningkat sebagai akibat dari adanya peningkatan kualitas standar hidup layak sehingga salah satu indikator IPM yakni standar hidup layak dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

The Human Development Index in East Nusa Tenggara Province is inseparable from several macro indicators such as inflation, GDP and regional minimum wages. This study aims to determine the effect of inflation, GRDP and Regional Minimum Wages on the Human Development Index either partially or simultaneously. This study uses time series data (source of the Central Statistics Agency) of East Nusa Tenggara Province, data collected from 2000-2019 uses multiple regression, then processed using SPSS 20. Based on the results of the study, it is found that partially and simultaneously there is no significant effect. between the variables of Inflation, GRDP and Regional Drinking Wages on the Human Development Index in East Nusa Tenggara Province. This is because the Human Development Index is influenced by the variables of inflation, GRDP and Regional Minimum Wages of only 27%, while the remaining 73% is influenced by other variables outside of this research model. The Regional Minimum Wage variable has a more dominant influence on the

HDI variable in the province of East Nusa Tenggara than the Inflation and GRDP variables because if the labor wage increases, the welfare of the workforce will increase as a result of an increase in the quality of a decent living standard so that one of the HDI indicators that is, a decent standard of living can be met.

Keywords: *Inflation, Gross Regional Domestic Product, Regional Drinking Wages, Human Development Index*

1. Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke-4 komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan (BPS.2012).

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia.

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan 22 kabupaten yang berada pada gugusan sunda kecil didalam kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau sumba, dan Pulau Timur Barat. Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat pulau Timur. Kesenjangan pengaruh di provinsi ini juga tergolong tinggi hal ini dikarenakan rasio gini provinsi NTT nasional yaitu 0.41. Kesenjangan sosial pada Provinsi ini masih tergolong tinggi. Selama kurang lebih tujuh tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat 31 dan 32 untuk Indeks Pembangunan Manusia tingkat nasional (Bappenas, 2017)

Berdasarkan BPS 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat 32 untuk Indeks Pembangunan Manusia indeks ini menggunakan tiga dimensi dalam pembangunannya itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata harapan lama sekolah pengeluaran per kapita perbulan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melalui seperti desa mandiri anggur merah, program keluarga harapan, dan program lainnya. Namun implementasi program ini masih tidak efektif karena Kehadiran investasi baru di NTT seperti pengembangan berbagai proyek startegis nasional, pertumbuhan industri gula disumba, pengembangan sektor ritel di Kota kupang dan pariwisata di

Labuan bajo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembukaan peluang kerja parawisata yang ada. Selain itu, program Dana desa yang telah dicairkan mulai tahun 2015 juga diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di daerah pedesaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal terpenting untuk mendukung hal ini melalui pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan.

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM selama periode tahun 2000-2019. Perubahan berupa peningkatan atau penurunan besaran komponen IPM yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Adapun perubahan dari masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor misalnya, pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum regional yang berpengaruh pada presentasi IPM dari tahun ketahun.

Data pada variabel inflasi, PDRB, UMR dan IPM yang telah uraikan diatas pada setiap tabel, di rangkum dalam satu tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 IPM, Inflasi, PDRB dan UMR Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 – 2019

TAHUN	IPM (%)	INFLASI (%)	PDRB (%)	UMR (Rp.)
2000	60,30	10,63	4,17	184.000
2001	61,04	12,34	5,10	275.000
2002	60,30	9,77	5,96	330.000
2003	60,10	5,45	5,87	350.000
2004	62,70	8,28	4,77	400.000
2005	63,59	15,16	3,46	450.000
2006	64,83	9,72	5,08	550.000
2007	65,36	8,44	5,15	600.000
2008	66,15	10,90	4,84	650.000
2009	66,60	6,49	4,29	725.000
2010	59,21	9,97	5,13	800.000
2011	60,24	4,32	5,62	850.000
2012	60,81	5,33	5,41	925.000
2013	61,68	8,41	5,56	1.010.000
2014	62,26	7,76	5,05	1.150.000
2015	62,67	4,92	4,92	1.250.000
2016	63,13	2,48	5,17	1.425.000
2017	63,73	2,00	5,16	1.525.000
2018	64,39	3,07	5,13	1.660.000
2019	65,23	3,25	6,29	1.793.293

Sumber: BPS Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di NTT sejak tahun 2000-2019 menunjukkan peningkatan rata-rata lebih besar dari 60, 30 kecuali pada tahun 2010 hanya 59,21.

Inflasi adalah keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum barang-barang yang berlangsung terus-menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 2012). Dengan demikian, keterkaitan inflasi dengan tingkat kesejahteraan terjadi karena akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian barang-barang dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya. Ada dua sisi efek dari inflasi, dimana ada sebagian masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari terjadinya inflasi dan ada juga masyarakat yang menderita karena inflasi tersebut.

Tingkat inflasi yang terjadi disuatu Negara atau daerah merupakan suatu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu Negara atau daerah, sehingga pemerintah atau penyelenggaraan Negara/daerah harus menjalankan kebijakan yang tepat dan mengawasi laju inflasi. Dalam perekonomian dimanapun di dunia ini tidak bisa dihindari inflasi, akan tetapi yang perlu diperhatikan tingkat inflasi jangan terjadi terus-menerus dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Terjadinya inflasi, juga akan memberikan efek dua arah, yaitu efek mempersulit keadaan ekonomi masyarakat, dan disisi yang lain akan memberikan efek memperbaiki keadaan ekonomi sebagian masyarakat. Selain inflasi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan, juga dipengaruhi oleh pendapatan domestik regional bruto.

Dilihat dengan tabel 1.1 tersebut dapat dikatakan bahwa inflasi di NTT sejak tahun 2000-2019 menunjukkan peningkatan rata-rata lebih besar dari 10,63 kecuali pada tahun 2017 menurun 2,00

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Kairupan, Davida. 2013). Oleh karena itu terlihat bahwa PDRB ini akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Dimana secara logika bila PDRB naik, maka dengan sendirinya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, dengan naiknya income perkapita akan sudah tentu tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan pun akan meningkat. Disamping itu PDRB dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu Negara/daerah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kependudukannya (Todaro, Michael.1988). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh dengan adanya kemampuan dari suatu Negara atau daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi termasuk lapangan pekerjaan bagi penduduknya, maka dapat terjadi peningkatan perolehan pendapatan dari para penduduknya. Sehingga pada akhirnya berefek pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu indikator untuk mengatahui suatu kondisi ekonomi di wilayah dalam periode tertentu yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik dilihat dari atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pertumbuhan ekonomi, situasi, kondisi, dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Produk Domestic Regional Bruto atas harga konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000-2019 yang di konversikan dalam Persen menunjukkan bahwa terjadi naik turun pada presentase PDRB sejak tahun 2000 hingga 2019 berkisar antara 4,17 persen sampai 6,29 persen.

Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan pada suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR), bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan kesejahteraan manusia. Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada IPM.

Permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya yaitu masalah upah yang rendah dibandingkan dengan Negara lain sehingga memiliki modal atau investor lebih suka berinvestasi di Indonesia karena modal yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai lebih dapat di minimalisir. disesuaikan dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang tinggi, Bps menghitung rasio pengangguran dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Hal ini bisa disebabkan karena penambahan tenaga kerja yang baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah dari lapangan pekerjaan yang telah tersedia. Meskipun bukan merupakan alasan yang utama, upah minimum berpengaruh penting terhadap kelompok tertentu dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu upah juga merupakan suatu kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang telah dibayarkan kepadanya.

Penetapan tingkat upah yang telah dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya suatu tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran nilai dari upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka hal ini akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan suatu kasus yang khusus dan teori nilai umum, upah sama dengan harga tenaga kerja.

Upah atau biasa juga disebut dengan balas karya tenaga kerja ada dua sisi yang penting, untuk pihak produsen upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak dari pekerja upah merupakan sumber penghasilan untuk dirinya serta keluarganya, dan juga menjadi sumber pembelanjaan untuk masyarakat. Tinggi atau rendahnya tingkat upah bersangkutan dengan pribadi manusia, harga diri, serta status dalam masyarakat, dan merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Upah Minimum Regional yang di konversikan dalam Rupiah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000-2019 pada tabel 1.1 tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2000 UMR sebesar Rp. 184.000 hingga tahun 2019 UMR telah meningkat menjadi Rp. 1.793.293. Pada tahun 2001 mulai terjadi peningkatan dengan rata-rata peningkatan UMR sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 80.465, yang berkisar antara Rp. 20.000 sampai Rp.133.293.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka dapat bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2019 rata-rata laju IPM 63,28 %, Inflasi 7,27 %, PDRB5,16 %, dan UMR Rp. 879.910. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari inflasi, PDRB dan UMR sangat berpengaruh terhadap IPM disuatu wilayah karena berdasarkan data dipaparkan pada tabel diatas lihat bahwa sejak tahun 2000 hingga 2019 lajunya IPM di provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh indikator atau

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa variabel inflasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perkembangan upah minimum regional sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu Negara atau daerah. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang dari sumber-sumber yang telah disediakan. Misalnya diambil dari bahan

pustaka, Badan Pusat Statistik, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah runtun waktu (*time series*) dari tahun 2000-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia provinsi nusa tenggara timur. Penulis mengambil rentang waktu selama 20 tahun dengan asumsi periode 20 tahun dirasa cukup menggambarkan pengaruh inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Variabel Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan lebih baik, maka perlu diketahui beberapa unsur penelitian seperti konsep, definisi operasional dan lainnya. Pemahaman ini diperlukan pada proses teorisasi, karena adanya pengetahuan tentang unsur-unsur tersebut maka peneliti ini akan merumuskan hubungan-hubungan teori dengan baik.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dirinci tentang variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini:

1. Variabel bebas (Independen)

Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya akan timbul variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah inflasi (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (X_2), Upah Minimum Regional (X_3).

2. Variabel terikat (Dependent)

Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (Y).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur yang standar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali, Imam. (2013) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut: "Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.

Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah:

- a. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastis

Menurut Ghozali, Imam. (2013) Uji heteroskedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali, Imam. (2013) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi diantara variabel bebas / variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol.

- a. Jika variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan adanya multikolinieritas.
- b. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi.
- c. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinieritas.

Metode Analisis data

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependent (Y). (Ghozali 2013).
Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan:

- Y : Indeks pembangunan manusia
 β_0 : Konstan
 β_1 : Koefisien regresi variabel inflasi (X_1)
 β_2 : Koefisien regresi variabel produk domestik regional bruto (X_2)
 β_3 : Koefisien regresi variabel upah minimum regional (X_3)
 X_1 : Variabel inflasi
 X_2 : Variabel produk domestik regional bruto
 X_3 : upah minimum regional
 ϵ_i : error term

Koefisien Regresi (R)

Koefisien regresi (r), bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Sumbangan Efektif (SE)

Sumbangan efektif (SE) dimaksudkan untuk mengetahui besar pengaruh atau kontribusi masing-masing

Variabel bebas (X) terhadap besarnya nilai variabel tidak bebas (Y). Total kontribusi dari setiap variabel bebas (X) akan sama besarnya dengan nilai koefisien determinasi (R^2)

SE= nilai koefisien korelasi (r-pm) x nilai koefisien Beta terstanderd

Nilai SE ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sumbangan efektif (SE) setiap variabel bebas (X) terhadap variabel tidak bebas (Y)

No	Variabel	Nilai Korelasi r-pm	Koefisien Beta Terstanderd	SE
1	X ₁ Inflasi	***	***	***
2	X ₂ PDRB	***	***	***
3	X ₃ UMR	***	***	***

Keterangan: Nilai tersebut akan di peroleh setelah analisis inferensial

Uji Hipotesis

Untuk melakukan pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik, sebagai berikut:

1. Uji parsial (uji t)

Uji statisti t ini adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat Y dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan niai ttabel dengan derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai thitung \geq ttabel, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Uji t ini menggunakan derajat kebebasan $df = n - k$ dimana $n =$ banyak observasi dan $k =$ jumlah regresor konstanta. Selain itu, pengujian ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar inflasi, PDRB dan upah minimum regional pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan melihat nilai-nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t itu, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh paling bermakna atau signifikan mempengaruhi variabel terkait.

2) Uji simultan (Uji F)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut memiliki tingkat signifikansi pada alpha 5%. Adapun metode untuk menentukan apabila nilai signifikan $< 0,05$ dan Fhitung $> F$ tabel.

Rumus df_1 dan df_2 adalah :

$$df_1 = k - 1 : df_2 = n - k$$

$$Uji F = \frac{r/k}{\frac{1-r}{n} - k - 1}$$

Keterangan:

- F = Pendekatan distribusi Probilitas Fisher
- r = Koefisien regresi
- k = jumlah variabel bebas
- n = banyaknya sampel

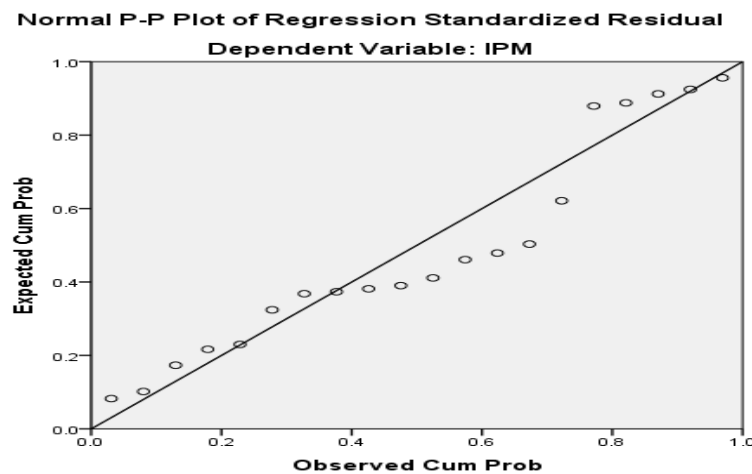
Penolakan hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5 % (taraf kepercayaan) dengan kriteria:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ditolak dan diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka ditolak dan diterima, yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kriteria sebuah (data) residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal P-P Plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot di bawah ini :



Gambar 1
Diagram Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber : Hasil olahan data dengan bantuan Spss 20

Berdasarkan gambar diagram diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai residual menyebar secara teratur mengikuti sumbu diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikoloniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikolinearitas dapat melihat nilai *tolerance* atau lawannya yaitu *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *VIF* yang diperkenankan adalah 10, jika nilai *VIF* lebih dari 10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas, yaitu terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel-variabel bebas, dan angka tolerance harus lebih besar > 0.10 ,

maka variabel tersebut tidak mempunyai masalah multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3. Hasil uji multikoloniaritas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	57.156	10.020		5.704	.000		
1	Inflasi	.041	.215	.065	.189	.853	.385	2.596
	PDRB	-1.287	.878	-.370	-1.466	.162	.718	1.393
	Upah Minimum Regional	1.803	1.066	.522	1.691	.110	.479	2.087

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

Berdasarkan tabel *Output Coefficient* diatas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance variable Inflasi adalah sebesar 0,385 dan VIF sebesar 2,596, variabel PDRB memiliki nilai tolence sebesar 0,718 dan VIF sebesar 1,393 dan variabel Upah Minumum Regional memiliki nilai Tolerance sebesar 0,479 dan nilai VIF sebesar 2,087. Hasil uji Multikoloniaritas ini menjelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan *Uji Durbin Watson (DW test)*. Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut :

- Jika nilai $DU < DW < 4-DL$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi.
- Jika nilai $DU < DL$ atau nilai $DW > 4 - DL$, artinya terjadi gejala autokorelasi.

Nilai DU dan DL ini dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson* (Priyatno, 2013). Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 20 *for windows* diperoleh hasil dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.519 ^a	.270	.133	2.07231	1.981

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, PDRB, Inflasi

b. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

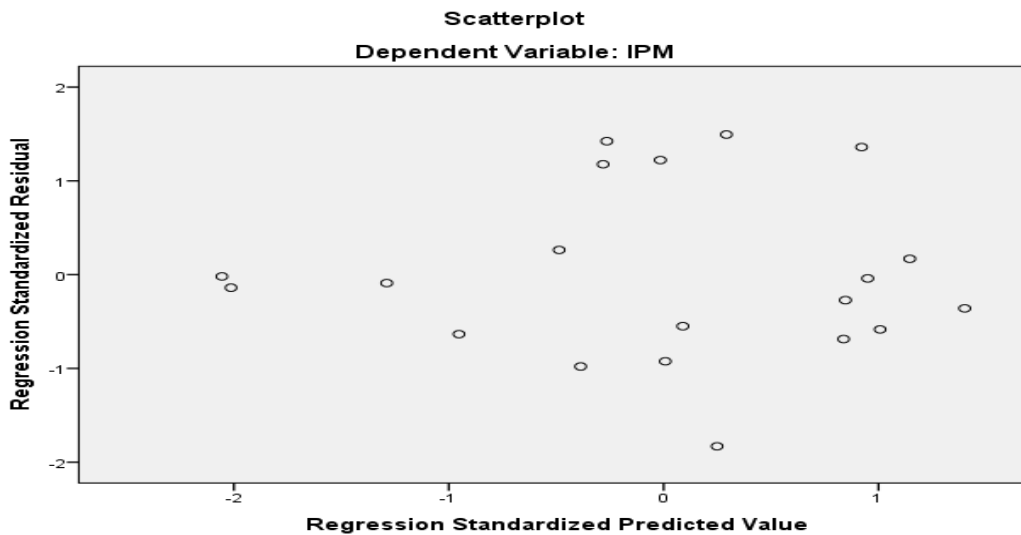
Dari *output* diatas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,981 sedangkan nilai DU dan DL yang diperoleh dari tabel *Durbin Watson* dengan n (sampel) = 20 dan k (jumlah variabel = 4) didapat nilai **DL = 0,894** dan **DU = 1,828**. Jadi nilai DL sebesar **0,894** dan besaran nilai $4 - DL$ atau $4 - 1,452 = 3,106$ (Tabel *Durbin Watson* terlampir).

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena nilai DW (1,981) terletak diantara nilai DU (1,828) dan nilai $4-DL$ (3,106) atau **$1,828 < 1,981 < 3,106$** maka **tidak terjadi gejala autokorelasi** pada model regresi ini. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis di atas dapat di lanjutkan.

Uji Heteroskedastitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui program SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bebas heterokedastisitas sehingga model regresi dapat dipakai. Hasil dari uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS 20 adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2
Scaterplot

Pada grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

Analisis Inferensial

Pengaruh Inflasi (X_1), PDRB (X_2) dan Upah Minimum Regional (X_3) terhadap IPM (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Inflasi (X_1), PDRB (X_2) dan Upah Minimum Regional (X_3) secara simultan terhadap IPM(Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih mendetail dapat dilihat pada tabel rekapitulasi data berikut ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Inflasi (X₁), PDRB (X₂) dan Upah Minimum Regional (X₃) Terhadap IPM (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Variabel	Koefisien Regresi (B)	F_{hitung}	F_{tabel}	Signifikansi
Constanta (β_0)	57,156	1,970	3,34	0,159
Inflasi (X ₁)	0,041			
PDRB (X ₂)	-1,287			
Upah Minimum Regional (X ₃)	1,803			
R	0,519			
R Square	0,270			

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai antar Inflasi (X₁), PDRB (X₂) dan Upah Minimum Regional (X₃) terhadap variabel IPM (Y) adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

$$Y = 57,156 + 0,041X_1 - 1,287X_2 + 1,830X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

β_0 = Konstanta Intersept

β_1 = Koefisien Variabel Inflasi

β_2 = Koefisien Variabel PDRB

β_3 = Koefisien Variabel Upah Minimum Regional

X₁ = Variabel Inflasi

X₂ = Variabel PDRB

X₃ = variabel Upah Minimum Regional

ϵ_i = Error

Nilai konstanta (β_0) = 57,156, ini menjelaskan bahwa apabila tidak ada perubahan pada variable Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional maka variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 57,156. Akan tetapi jika ada perubahan pada variabel Inflasi sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia akan bertambah sebesar 0,041, jika ada perubahan pada variabel PDRB sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia akan berkurang sebesar -1,287 dan jika ada perubahan pada variabel Upah Minimum Regional sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia akan bertambah sebesar 1,803.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai koefisien regresi (R) variabel Inflasi (X₁), PDRB (X₂) dan Upah Minimum Regional (X₃) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 0,519 yang berarti bahwa antara variable Inflasi, PDRB, Upah Minimum Regional dan variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang **kuat**.

Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan tentang variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) ditentukan oleh variable Inflasi (X₁), PDRB (X₂) dan Upah Minimum Regional (X₃) yang dilihat dari

hasil analisis koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,270 yang berarti bahwa besarnya variabel Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh variabel Inflasi (X_1), PDRB (X_2) dan Upah Minimum Regional (X_3) sebesar 27,0 % sedangkan sisanya sebesar 73 % di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 6. Hasil uji t

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients			
	(Constant)	57.156	10.020		5.704	.000
1	Inflasi	.041	.215	.065	.189	.853
	PDRB	-1.287	.878	-.370	-1.466	.162
	Upah Minimum Regional	1.803	1.066	.522	1.691	.110

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k (20 - 4 = 16)$, maka dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar 0,189. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dimana $0,189 < 1,745$ dan tingkat signifikansi $0,853 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k (20 - 4 = 16)$, maka dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar -1,466. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dimana $-1,466 < 1,745$ dan tingkat signifikansi $0,162 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDRB (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k (20 - 4 = 16)$, maka dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar 1,691. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dimana $1,691 < 1,745$ dan tingkat signifikansi $0,110 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Upah Minimum Regional (X_3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 7. Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.377	3	8.459	1.970	.159 ^b
	Residual	68.712	16	4.294		
	Total	94.089	19			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, PDRB, Inflasi

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dengan $df_1 = k - 1 (4 - 1 = 3)$ dan $df_2 = n - k - 2 (20 - 4 - 2 = 14)$, maka dapat diperoleh F_{tabel} sebesar 3,34 dan F_{hitung} sebesar 1,970. Dengan demikian maka nilai

F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} dimana $1,970 < 3,34$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,159 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi (X_1), PDRB (X_2) dan Upah Minimum Regional (X_3) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia(Y). hal ini menjelaskan bahwa dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari perbaikan pada kualitas pendidikan dan kesehatan tenaga kerja sehingga mampu untuk menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan pendapatan perkapita serta pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi pun ikut meningkat.

Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT dapat ditolak. Karena data yang digunakan ini tidak berhasil untuk membuktikan teori yang ada.

Sumbangan Efektif

Sumbangan efektif (SE) dimaksudkan untuk mengetahui besar pengaruh atau kontribusi masing-masing Variabel bebas (X) terhadap besarnya nilai variabel terikat (Y). Total kontribusi dari setiap variabel bebas (X) akan sama besarnya dengan nilai koefisien determinasi (R^2)

Tabel 8
Rekapitulasi Nilai Koefisien beta, Koefisien Korelasi dan SE

Variabel	Koefisien Beta	Koefisien Korelasi	SE
Inflasi	0,065	-0,116	-0,008
PDRB	-0,370	-0,241	0,089
UMR	0,522	0,360	0,188
Jumlah			0,270

Sumber: hasil olahan data sekunder dengan bantuan Spss versi 20

Rumusan untuk menghitung SE adalah sebagai berikut:

$SE(X) \% = \text{Beta}_x \times \text{Koefisien Korelasi}$

1. sumbangan efektif variabel Inflasi (X_1) terhadap IPM (Y) yaitu :

$SE(X_1) \% = \text{Beta}_{X1} \times r_{xy}$

$SE(X_1) \% = (0,065) \times (-0,116)$

$SE(X_1) \% = -0,008$

2. sumbangan efektif variabel PDRB (X_2) terhadap IPM (Y) yaitu :

$SE(X_2) \% = \text{Beta}_{X2} \times r_{xy}$

$SE(X_2) \% = (-0,370) \times (-0,241)$

$SE(X_2) \% = 0,089$

3. Sumbangan Efektif variabel Upah Minimum Regional (X_3) terhadap IPM (Y) yaitu :

$SE(X_3) \% = \text{Beta}_{X3} \times r_{xy}$

$SE(X_3) \% = (0,522) \times (0,360)$

$SE(X_3) \% = 0,188$

Jadi sumbangan Efektif (SE) total dapat dihitung sebagai berikut :

$SE \text{ total} = SE(X_1) + SE(X_2) + SE(X_3)$

$SE \text{ total} = -0,008 + 0,089 + 0,188$

$SE \text{ total} = 0,270$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa sumbangan efektif (SE) variabel Inflasi (X_1) terhadap IPM (Y) adalah sebesar $-0,008$, kemudian sumbangan efektif variabel PDRB (X_2) terhadap IPM (Y) adalah sebesar $0,089$ dan sumbangan efektif variabel Upah Minimum Regional (X_3) terhadap IPM (Y) adalah sebesar $0,188$. Untuk sumbangan total adalah sebesar $0,270$ atau sama dengan koefisien determinasi (R square) analisis regresi yakni $0,270$.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Regional (X_3) memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel IPM (Y) di provinsi Nusa Tenggara Timur dari pada variabel Inflasi (X_1) dan PDRB (X_2) dikarenakan apabila upah tenaga kerja mengalami peningkatan maka kesejahteraan tenaga kerja tersebut akan meningkat sebagai akibat dari adanya peningkatan kualitas standar hidup layak sehingga salah satu indikator IPM yakni standar hidup layak dapat terpenuhi. Kemudian dengan adanya peningkatan upah minimum ini akan menambah kinerja tenaga kerja dan produktifitas. Selain itu PDRB (X_2) juga memiliki pengaruh positif terhadap IPM (Y) di provinsi Nusa Tenggara Timur karena PDRB merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah dan juga sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan disuatu daerah dalam satu tahun. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini menandakan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan menambah daya beli masyarakat akan suatu barang meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun tercapai sehingga salah satu indikator IPM yaitu standar hidup layak dapat terpenuhi. Kemudian inflasi (X_1) memiliki pengaruh yang negative terhadap IPM (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena adanya inflasi menandakan bahwa adanya masalah pada perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya harga – harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang sementara penawaran barang tetap dan tidak bertambah atau kurangnya distribusi barang. Dengan adanya inflasi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat akan suatu barang menurun akibat dari harga barang terlalu tinggi sehingga membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Regional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT baik secara parsial maupun simultan.

Daftar Pustaka

- Aaker, David. A. (2004). *Marketing Research*. USA. New Jersey.
- Badan pusat statistik. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia*. Nusa Tenggara Timur
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Indeks Pembangunan Manusia*. Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta
- Bappenas. (2017). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Bappenas. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta.
- Bdan Pusat Statistk. (2000). *Indikator Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Surakarta Dalam Angka Tahun 2006*. Badan PusStatistik. Kota Surakarta
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Dalam Angka*. Bps. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Konsumsi Buah Dan Sayuran Susenas*.

- Brata, A.G. (2004). Analisis Hubungan Timbal Balik Antara Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II Di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Bodie, Kane dan Marcus. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi. Jakarta
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gorman T. 2009. *The Complete Ideal's Guide. Economics*. Prenada. Jakarta. Dan Griffin, W, Ricky dan Ronald J Ebert. (2002). *Management*, Erlangga, Jakarta
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Kewal, S. Suci. (2012). Pengaruh Inflasi. Suku Bunga. Kurs. Dan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Ekonomi*.
- Kairupan, Siestri Pristina. (2013). *Produk Domestic Regional Bruto (Pdrb). Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja*. Jurnal EMBA. Sulawesi Utara
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Kaswan, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muchdarsyah Sinungan. (1992). *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Masagung. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ke-4. Erlangga. Jakarta.
- Moekijat. (1992). *Daministrasi Gaji Dan Upah*. Manjar Maju. Bandung.
- Nopirin. (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro*. Yogyakarta
- Nasution, H.S. (2010). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan PDRB Era Desentralisasi Fiskal Di Provinsi Banten.
- Nanga, Muana. (2001). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Pertama. Rajawali Press. Jakarta.
- Pangkey, T. Tito. (2013). *Analisis Servicescape Terhadap Berbintang Dimanado (Studi Pada Hotel Quality Manado)*. Jurnal EMBA
- Rahardja, Prathama. (1997). *Uang Dan Perbankan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Robinso, (2008). *Manajemen Strategi (Formulasi. Implementasi. Dan pengendalian)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Bandung*.
- Saraswati Dan Baridwan, Zaki. (2013). *Penerimaan Sistem E-Commerce. Pengaruh Kepercayaan. Persepsi Manfaat Dan Persepsi Risiko*. JIMFEB.
- Sukwiaty, Dkk. (2009). *Ekonomi SMA Kelas X*. Yudistira. Jakarta.
- Sadono, Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT: Jakarta
- Todaro, M. P. Dan Sminth Stephen. C. (2003). *Pembanguna Ekonomi Didunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jilid 2. Erlangga Jakarta.
- Unitet Nation Development Programme (UNDP)*. (1990). *Global Human Development Report. Human Resources Department*
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.